

**“ PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE YANG
MENIMBULKAN SUATU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
UNDANG UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK“.**

TESIS

oleh:

R. EDI SEWANDONO

201820252007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : “Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Secara Online Yang Menimbulkan Suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “.

Nama Mahasiswa : R. Edi Sewandono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820252007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 4 Desember 2020

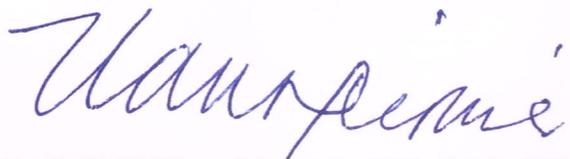


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.

NID: 0325117405


Dr. Ir.H.M.Hanafi Darwis, S.H.,S.Pd., M.M.

NID:010803018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis "Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Secara Online Yang Menimbulkan Suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ".

Nama Mahasiswa R. Edi Sewandono

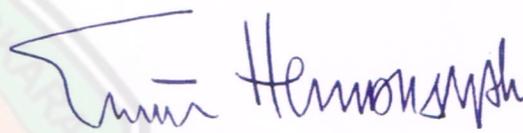
Nomor Pokok Mahasiswa 201820252007

Program Studi/Fakultas Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 4 Desember 2020

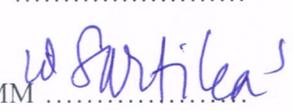
Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

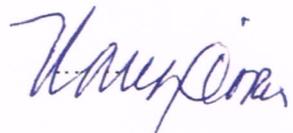
NIDN: 0319046403

Penguji I


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN:0312117102

Penguji II


Dr. Ir.HM Hanafi Darwis, SH., S.Pd.,MM.

NIDN:010803018

Mengetahui,

Ketua Program Studi

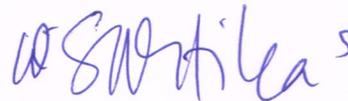
Magister Ilmu Hukum

Dekan Hukum,



Dr. Lusia Sulastri, SH, MH.

NID : 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NID: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

“Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Secara Online Yang Menimbulkan Suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah..

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya mengizinkan tesis saya ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. untuk menyimpan tesis ini dipinjam dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 15 Februari 2021



R. Edi Sewandono
201820252007

ABSTRAK

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik penyebaran informasi. Penyalahgunaan transaksi elektronik di dunia maya kini telah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan mengacu pada peraturan perundang undangan tersebut maka pada perkara pidana yang telah diproses di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan pemakaian identitas palsu dapat divonis oleh Majelis Hakim. Artikel ini bertujuan menganalisis 2 kasus pidana yang telah divonis di Pengadilan Negeri dengan menguraikan peraturan perundang undangan yang terkait, serta subyek hukum yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis Majelis Hakim, namun hukumannya masih belum memenuhi unsur materiil dan immateriil. Subyek hukum yang terlibat adalah pelaku utama (dader) dan turut serta pelaku (medepleger). Upaya penambahan hukuman sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan agar tercipta rasa keadilan.

Kata Kunci: berita bohong, dader, medepleger, materiil, immateriil.

Abstract

One of the problems of cyber crime which is also very disturbing and has received the attention of various parties is the problem of falsifying information or electronic documents of information dissemination. The misuse of electronic transactions in cyberspace has now been regulated in Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. By referring to the aforementioned statutory regulations, criminal cases that have been processed in the District Court relating to the spread of fake news and the use of false identities can be sentenced by the Panel of Judges. This article aims to analyze 2 criminal cases that have been convicted in the District Court by outlining the relevant laws and regulations, as well as the legal subjects involved. The results showed that the verdict of the Panel of Judges, however, the sentence still did not fulfill the material and immaterial elements. The legal subjects involved are the main actors (daders) and participating actors (medepleger). Efforts to increase penalties in accordance with the Consumer Protection Law are needed in order to create a sense of justice.

Keywords: fake news, dader medepleger, material immaterial.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan pujian penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas, perlindungan serta berkat rahmatNya, sehingga yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulisan Tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Secara Online Yang Menimbulkan Suatu Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan Tesis ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnya dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang di kuasai penulis.

Tesis ini dapat diselesaikan diantaranya berkat bantuan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu disini penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs., Bambang Karsono S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta;
4. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing 1 dalam penulisan Tesis ini, yang dimana telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam setiap proses pembuatan Tesis ini;
5. Bapak Dr. Ir.H.M.Hanafi Darwis,S.H.,S.Pd., M.M., sebagai Pembimbing 2 dalam Penulisan Tesis ini dan Penguji 3 dalam sidang proposal dan tesis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam penyesuaian Tesis ini serta memberikan pesan moral, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi baik akademik maupun non akademik
6. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah,SH.,M.H., selaku Penguji 1 Sidang Proposal dan Tesis yang telah memberikan saran dan masukan untuk menjadikan Tesis ini lebih baik;
7. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Penguji 2 Sidang Tesis yang telah memberikan saran dan masukan untuk menjadikan Tesis ini lebih baik;
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung;
9. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, cinta, kesabaran, dan dukungan selama penulis menjalani Pendidikan sampai pada akhirnya penulis menyelesaikan Tesis ini;

10. Rekan-rekan advokat/pengacara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan pengarahan dan dukungan dalam bidang hukum;
11. Rekan-rekan serta sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan cintanya selama penulis menyelesaikan Tesis ini.

Demikianlah, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 15 Februari 2021



R. Edi Sewandono
NPM: 201820252007

DAFTAR ISI

Halaman Judul-----	i
Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis- -----	ii
Lembar Pengesahan Tesis -----	iii
Lembar Pernyataan-----	iv
Abstrak -----	v
Abstract-----	vi
Kata Pengantar-----	vii
Daftar Isi -----	ix
Daftar Tabel -----	ix
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Batasan Masalah -----	6
1.3. Identifikasi Masalah -----	6
1.4. Rumusan Masalah -----	7
1.5. Tujuan Penelitian -----	7
1.6. Manfaat Penelitian -----	8
1.7. Metode Penelitian -----	8
1.8. Kerangka Pemikiran-----	13
1.9. Sistematika Penulisan Tesis -----	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Unsur Unsur Tindak Pidana Pada Umumnya-----	17
2.2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Umumnya-----	19
2.3. Pengertian Sanksi Pidana-----	21
2.4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana-----	22
2.5. Tinjauan Tentang Jual Beli Pada Umumnya-----	24
2.6. Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik Umumnya-----	28

2.7. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Umumnya-----	34
2.8. Prinsip hukum hubungan pertanggungjawaban.-----	49

BAB III Penyelesaian sengketa hukum pidana pada transaksi elektronik dengan menggunakan pembayaran e-commerce di Indonesia----- 52

3.1. Pengaturan Hukum Terkait Kegiatan E-Commerce di Indonesia-----	54
3.1.1. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut UU ITE 19/2016.-----	55
3.1.2. Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut KUH Perdata-----	63
3.1.3. Ketentuan Ketentuan Hukum Kegiatan E-Commerce menurut KUHP dan KUHPA.-----	67
3.1.4. Ketentuan Kegiatan E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.-----	70
3.1.5. Ketentuan Kegiatan E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.-----	72
3.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (PP PSTE).-----	73
3.2. Penegakan Hukum terhadap kegiatan dan kejahatan E-Commerce Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.-----	75

BAB IV Pihak yang bertanggung jawab dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik dan penyelesaian sengketa online marketplace berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri---78

4.1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor	
--	--

1349/Pid.Sus/2019/PN Bdg.-----	78
4.2. Putusan Pengadilan Negeri Barru Sulsel, Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bar-----	88
4.3. Analisis kasus Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Suatu Transaksi Jual Beli Secara Elektronik / Online-----	94
4.4. Penemuan Hukum dalam suatu perbuatan hukum pidana transaksi elektronik-----	107
BAB V PENUTUP-----	127
A. Simpulan -----	127
B. Saran -----	129

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

(kosong)

